

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor:**  
**216/Pid.Sus/2016/PN. Skt.)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada**  
**Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**LUIS DAVID HERMAWAN**  
**C 100130081**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor:**  
**216/Pid.Sus/2016/PN. Skt.)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

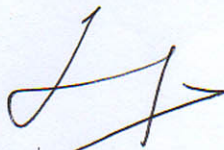
Oleh :

**LUIS DAVID HERMAWAN**

**C 100130081**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Kuswardhani S.H, M.Hum.)**


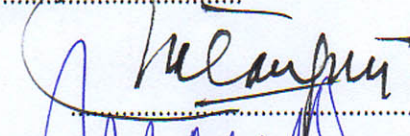
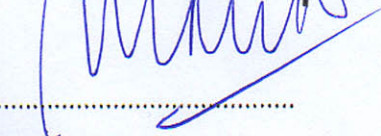
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
(Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor:  
216/Pid.Sus/2016/PN. Skt.)

Oleh :  
**LUIS DAVID HERMAWAN**  
C 100130081

Telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada : 11 Februari 2018

Dewan Penguji:

1. Kuswardhani, S.H, M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum  
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Sudaryono, S.H, M.Hum  
(Anggota Dewan Penguji II)

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



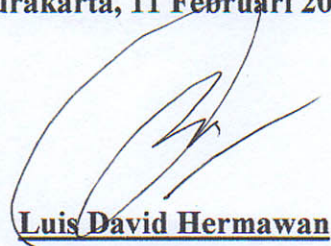
  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S. H. M. Hum)



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Surakarta, 11 Februari 2019**



**Luis David Hermawan**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor:**  
**216/Pid.Sus/2016/PN. Skt.)**

**Abstrak**

Masalah yang hendak diteliti adalah; (a) Bagaimana Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia?; b) Apa Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt Menurut UU Tindak Pidana Narkotika?; (c) Bagaimana Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. Yaitu jenis penelitian yang sifatnya yang memberikan gambaran nyata tentang Peraturan – Peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana narkotika yang telah di putus oleh pengadilan Negeri Surakarta dengan UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Tujuan Penelitian ini adalah; (a) Untuk mengetahui Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia; (b) Untuk mengetahui Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt Menurut Uu Tindak Pidana Narkotika; (c) Untuk mengetahui Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

**Kata Kunci:** Narkotika, Pengaturan secara Hukum Positif, Pengaturan secara Hukum Islam

**Abstract**

The problem to be examined is; (a) What is the Regulation of Narcotics Crime in Indonesian Positive Criminal Law ?; b) What is the Category of Actors of Criminal Acts in Judges' Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Skt and Decision Number: 216 / Pid.Sus / 2016 / Pn. Skt According to the Narcotics Criminal Act ?; (c) How is Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Criminal Law ?. The type of research used in this study is descriptive. That is the type of research that gives a clear picture of the Regulations - the existing regulations apply as positive law and its implementation in legal practice regarding narcotics crimes which have been broken up by the Surakarta District Court with RI Law No. 35 of 2009, About Narcotics. The purpose of this study is; (a) To know the Regulation of Narcotics Crime in Indonesian Positive Criminal Law; (b) To find out the Category of Actors in Criminal Acts in Decision of Judge Number: 220 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Skt and

Decision Number: 216 / Pid.Sus / 2016 / Pn. Skt According to Uu Narcotics Criminal Act; (c) To find out about Narcotics Crimes in the Perspective of Islamic Criminal Law.

**Keywords:** Narcotics, Positive Legal Arrangement, Islamic Law Arrangement

## **1 PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Pengertian narkotika diatur pada Pasal 1 butir 1 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika:

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, April 2011.

<sup>2</sup> Penjelasan UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.<sup>3</sup>

Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt menyatakan terdakwa DIDIT SANTOSO ALS. DIDIT BIN SUBAGIO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri“ melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.

Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt menyatakan terdakwa ARIIF ENDRO WIBOWO Alias TROMOL Bin SUDARMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Dalam persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Al-Qur'an menyatakan keharaman narkotika diantaranya melalui berbagai ayat, salah satunya adalah:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

---

<sup>3</sup> Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 18.

<sup>4</sup> A. Soedjono, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, hal. 41.

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”  
(QS. Al Baqarah: 195).

Dalam hal ini Ibn Hajar sendiri menyampaikan hadits yang secara khusus menegaskan keharaman ganja:<sup>5</sup>

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ.  
(رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ)

“Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, ia berkata: “Rasulullah telah melarang (mengonsumsi) segala zat yang memabukkan dan melemahkan badan.”

(HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, dan Abu Dawud dalam *Sunannya*, dengan sanad shahih)

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt)**

Rumusan Masalah yang hendak diteliti adalah; (a) Bagaimana Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia; (b) Bagaimana Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt Menurut Uu Tindak Pidana Narkotika?; (c) Bagaimana Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

Tujuan Penelitian ini adalah; (a) Untuk mengetahui Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia; (b) Untuk mengetahui Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt Menurut Uu Tindak Pidana Narkotika; (c) Untuk mengetahui Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

---

<sup>5</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, IV/231. Al-Maktabah as-Syamilah, al-Ishdar at-Tsani 2.11.



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkoba yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.

## **2. METODE**

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai tindak pidana narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

### **2.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan

Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkoba yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.

### 2.3 Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:<sup>6</sup>

a. Data Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>7</sup> Bahan primer penelitian ini berupa Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba dan dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkoba.

b. Data sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka.<sup>8</sup> Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan tentang tindak pidana narkoba.

### 2.4 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analisis* yakni mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan berupa Kitab Undang-undang hukum pidana KUHP, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 1.

<sup>8</sup> *Ibid*,hal. 1.

Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Putusan hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/PN. Skt tentang tindak pidana narkotika sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Regulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia**

Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika;

##### **Pasal 113 Ayat (2)**

Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

##### **Pasal 114 Ayat (2)**

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

##### **Pasal 116 Ayat (2)**

Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain (secara tanpa hak atau melawan hukum) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Ayat (2)

Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Ayat (2)

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Ayat (2)

Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 113 Ayat (1)

Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkoba dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sanksi bagi pengedar narkoba (khususnya pengangkut narkoba seperti Anda) diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkoba. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkoba dan berat narkoba, diantaranya:

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan III, dipidana dengan



pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Ketentuan pidana bagi perantara jual beli prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 129 yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- (1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- (2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- (4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan diatur pada Pasal 489 KUHP, yaitu:

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

### **3.1 Kategori Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn. Skt Menurut Undang-undang Tindak Pidana Narkotika**

- a) Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt
  - a. Analisis

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi Majelis lebih cenderung untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur setiap orang

Unsur setiap orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia (pelaku) sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapapun asalknya, kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang dapat dituntut berdasarkan Pasal yang terkait.

2) Unsur Tanpa Hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri

Tanpa hak artinya terdakwa bukanlah pihak yang berhak meng Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut undang-undang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Surat dan petunjuk maka didapatkan fakta bahwa DIDIT SANTOSO ALS. DIDIT BIN SUBAGIO bukanlah dokter, pedagang farmasi ataupun orang yang oleh undang undang diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada izin atau dokumen yang syah dari yang berwenang.

Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan terduga pengguna Narkoba an. DIDIT SANTOSO ALS. DIDIT BIN SUBAGIO N0. R/ 49/SKM/N/V/2016/Ur. Kes. Dengan Kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil Positif terhadap Amfetamine dan Methamfetamine. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Terdakwa dalam kasus narkoba yang di putuskan oleh hakim diancam pidana dengan Pasal 127, yaitu:

- a. Setiap Penyalah Guna:
  - 1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - 2) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - 3) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Mengadili

- a. Menyatakan terdakwa DIDIT SANTOSO ALS. DIDIT BIN SUBAGIO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah hand phone merk Samsung GTC3322, warna silver/ hitam dengan nomor panggil 0895336444641, dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah);

b) Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2016/Pn.Ska

a. Analisis Putusan

Narkotika adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya haruslah mendapat perhatian khusus, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, oleh karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ praduga tidak bersalah “(*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law* ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ jujur “ dan “ adil “ (*to ensures a fair and just trial* ) serta bersifat tidak memihak (*impartially*).

Menimbang, bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan KEDUA melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1) Setiap orang

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan, ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa mampu berbuat dan menanggung jawaban perbuatannya secara sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa sehingga sesuai pertimbangan bahwa terdakwa adalah subyek hukum.

2) Tanpa hak atau melawan hukum

Terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum (*wederechttelijk*) adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan R.I. Pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa,



telah ternyata padahari Sabtu tgl. 06 Mei 2016 sekitar jam 11.45 Wib terdakwa telah ditangkap Polisi di rumah terdakwa di Kp. Yosoroto Rt.005 Rw.008, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu seberat 1,240 gram dan pil ekstasi sebanyak 21 (duapuluh satu) butir tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Shabu yang disita dari terdakwa adalah shabu yang dibeli dari MOJO seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer di ATM BCA Purwosari, sedangkan Pil Ekstasi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir adalah titipan dari MOJO untuk diberikan pada seseorang yang membutuhkan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No.Lab:722/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat 1,240 gram dan 21 (dua puluh satu) butir tablet warna coklat berat bersih 6,531 gram adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa dari uraian fakta tersebut maka terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Mempertimbangkan unsur ke-3 ini Maj mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan ad.2 diatas dimana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana di terangkan dalam Berita

Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Mei 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil transparan di duga berisi shabu d 21 ( dua puluh satu) buti pil ekstasi yang disita dari terdakwa beratnya adalah 1,2 gram dan 6,531 gram pil ekstasi yang keseluruhan beratnya: 7,771 gram yang dalam persidangan ini beratnya tinggal,1,232 gram untuk shabu dan 6,205 gram untuk ekstasi setelah diambil sebagian untuk digunakan pemeriksaan Laboratoriu Kriminalistik.

Pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tind pidana “Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undan Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hak juga memperoleh keyakinan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotik Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5(Lima) Gram.

#### Mengadilil

- a. Menyatakan terdakwa Arif Endro Wibowo Alias Tromol tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arif Endro Wibowo Alias Tromol oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 8 (delapan) tahun dan pidanadenda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti denganpidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/ plastik klip kecil transparan berisi Shabu
  - 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi;
  - 1 (satu) unti timbangan digital warna hitam;
  - Sebuah tempatacamata.
  - Sebuah celana pendek warna biru gelap;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simpati 081229812256 Dirampas untuk dimusnahkan ;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

### 3.3 Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Dalam hal ini Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) menegaskan:<sup>9</sup>

وَأَمَّا مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ الْأَشْرَبَةِ وَالْأَنْوِيَةِ كَالْبَنْجِ وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ الْمَعْرُوفَةُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ.

“Barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) danobat, seperti ganja dan Hasyisy (cannabis ruderalis/ganja India yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr.”<sup>10</sup>

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Abu Ishaq as-Syirazi (393-476 H/1003-1083 M), IbnDaqiq al-‘Id (625-702 H/1227-1302 M), sebagaimana dikutip oleh IbnHajar al-Haitami (909-974 H/1504-1567 M) dalam *al-Fatawa*

<sup>9</sup>Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, 1413, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Bab III hal. 9.

<sup>10</sup>Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1406-1986, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: *Dzat as-Salasil*, Bab VIII, hal. 217.

*al-Fiqhiyyah al-Kubra*.<sup>11</sup> Bahkan dalam buku tersebut Ibn Hajar sendiri menyampaikan hadits yang secara khusus menegaskan keharaman ganja.<sup>12</sup>

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ)

“Diriwayatkan dari Ummu Salamahra, ia berkata: “Rasulullah telah melarang (mengonsumsi) segala zat yang memabukkan dan melemahkan badan.”(HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, dan Abu Dawud dalam *Sunannya*, dengan sanad shahih).

Adapun sanksi atau hukuman bagi pengonsumsi narkoba yang bukan dalam rangka pengobatan menurut Mayoritas Ahli Fikih adalah hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan kemaslahatan menurut kebijakan pemerintah. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, denda, dan selainnya, yang menurut pemerintah dapat memberi efek jera baginya. Bahkan dalam konteks ini menurut Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah pemerintah dapat memberlakukan hukuman mati bila memang kasusnya berulang-ulang dan pelaku tidak jera dengan hukuman selainnya. Syaikh Wahbahaz-Zuhaili mengatakan:<sup>13</sup>

وَأَجَازَ فَقَهَاءُ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَةُ التَّغْزِيرِ هِيَ الْقَتْلُ، وَيُسَمَّوْنَهُ الْقَتْلَ سِيَاسَةً، أَيْ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ جِنْسُ الْجَرِيمَةِ يُوجِبُ الْقَتْلَ، كَمَا فِي حَالِ التَّكَرَّرِ أَوْ إِدْمَانِ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُخَدِّرَاتِ ...

“Para Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan sanksi takzir berupa hukuman mati yang diistilahkan dengan al-qatlsiyasah (hukuman mati karena siasat).<sup>14</sup> Maksudnya ketika hakim menilainya sebagai kemaslahatan dalam masalah terkait dan jenis kejahatannya menetapkan hukuman mati, seperti berulang-ulang atau terus-menerusnya mengonsumsi minuman keras dan narkoba.”

#### 4. PENUTUP

<sup>11</sup>IbnHajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Bab IV, hal.231 & Al-Maktabah as-Syamilah, al-Ishdar at-Tsani BAB II, hal. 11.

<sup>12</sup>Ad-Dimyathi, Utsmanbin Muhammad Syatha. 1415 H/1995 M. *HaahsiyyahI'annah at-Thalibin 'ala Hall AlfazhFath al-Mu'in*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>13</sup>Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII/450.

<sup>14</sup>Tentang konsep *ta'zir al-qatlsiyasah*, baca Muhammad Amin Ibn 'Abidin, 1423H/2003M, *Radd al-Muhtar 'alaDurr al-Mukhtar*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, Bab VI, hal. 107.

#### 4.1 Kesimpulan

Sanksi bagi bandar narkoba berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkoba: Pasal 113 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2). Sanksi bagi pengedar narkoba (khususnya pengangkut narkoba) diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkoba. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkoba dan berat narkoba, diantaranya: Pasal 115, Pasal 125, Pasal 120. Ketentuan pidana bagi perantara jual beli prekursor narkoba terdapat dalam Pasal 129. Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan diatur pada Pasal 489 KUHP.

Terdakwa pada Putusan Hakim Nomor: 220/Pid.Sus/2016/Pn.Skt telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi Majelis lebih cenderung untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : (a) Unsur setiap orang; (b) Unsur Tanpa Hak menyalah gunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Didit Santoso Als. Didit Bin Subagio dengan identitas tersebut di atas telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “; (a) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; (b) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; (c) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; (d) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah).

Dalam persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Dalam hal ini Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) menegaskan: *“Barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) dan obat, seperti ganja dan Hasyisy (cannabis ruderalis/ganja India yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr”*.

Adapun sanksi atau hukuman bagi pengonsumsi narkoba yang bukan dalam rangka pengobatan menurut Mayoritas Ahli Fikih adalah hukuman *ta’zir* yang disesuaikan dengan kemaslahatan menurut kebijakan pemerintah. *Ta’zir* dapat berupa hukuman penjara, denda, dan selainnya, yang menurut pemerintah dapat memberi efek jera baginya. Bahkan dalam konteks ini menurut Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah pemerintah dapat memberlakukan hukuman mati bila memang kasusnya berulang-ulang dan pelaku tidak jera dengan hukuman selainnya. Syaikh Wahbahaz-Zuhaili mengatakan: *“Para Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan sanksi takzir berupa hukuman mati yang diistilahkan dengan al-qatlsiyasah (hukuman mati karena siasat).Maksudnya ketika hakim menilainya sebagai kemaslahatan dalam masalah terkait dan jenis kejahatannya menetapkan hukuman mati, seperti berulang-ulang atau terus-menerus mengonsumsi minuman keras dan narkotika.”*

## 4.2 Saran

Pemerintah dalam mereformasi Undang-Undang Pidana Napza untuk ke depan hendaknya memfasilitasi baik narkoba maupun psikotropika dengan membuat undang-undang tentang narkoba dan psikotropika yang benar-benar dijadikan satu.

Tanaman-tanaman yang dimasukan sebagai tanaman terlarang pun sehendaknya ditulis dengan benar tanaman spesies apa yang persisnya dilarang, dan bagian yang mana yang biasanya berpotensi disalahgunakan.

Peraturan perundang-undangan pidana napza di Indonesia masih kurang jelas dalam hal mendefinisikan zat-zat apa saja yang termasuk di dalam narkoba atau psikotropika. Undang-Undang Narkoba yang baru yang merupakan instrumen hukum pidana napza yang juga mengatur tentang psikotropika berat sangat kurang dalam pengaturannya mengenai psikotropika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ad-Dimyathi, Utsmanbin Muhammad Syatha. 1415 H/1995 M. *HahsyiyahI'annah at-Thalibin 'ala Hall AlfazhFath al-Mu'in*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amin Ibn 'Abidin, Muhammad, 1423H/2003M, *Radd al-Muhtar 'alaDurr al-Mukhtar*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, Bab VI

Al-Haitami, Ibn Hajar, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, IV/231. Al-Maktabah as-Syamilah, al-Ishdar at-Tsani

Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, VII/450.

Bin Syaraf an-Nawawi, Muhyiddin, 1413, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Bab III

Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soedjono, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni

### **Jurnal**

Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014, *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta.

Novita Eleanora, Fransiska, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, April 2011.

Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1406-1986, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: *Dzat as-Salasil*, Bab VIII

### **Undang-undang**

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika